



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025





PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**

**DUKCAPIL
GO
DIGITAL**



Jalan Ir. Sutarni Kec. Sekupang, Batam



<https://disdukcapil.batamgo.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2025

**PIR. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,**



Drs. YUSFA HENDRI, M.Si
NIP. 19690913 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI	6
 DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6
2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan ... dan Pencatatan Sipil	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25
BAB III.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	28
 DAERAH	28
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat	28
3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025.	30
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	41
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Catatan Penting	55
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	55
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	
	Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	7
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	29
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun .. 2025	31
Tabel 3.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
	Perangkat Tahun 2025	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap komponen organisasi dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis ke arah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan baik jangka panjang maupun jangka menengah serta visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka perwujudan *good governance* yang mampu menghadirkan *service excellent* (pelayanan prima) di semua lini pelayanan. Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil (*outcome*) yang optimal diperlukan penyusunan program kegiatan yang *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely*), sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih serta bertanggung jawab.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan bentuk pelaksanaan amanah Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja merupakan rencana perubahan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan perubahan RKPD karena adanya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan. Perubahan Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan.

Perubahan Renja ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan. Perubahan Renja ini disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dapat dijalankan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan serta melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja

tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berdaya guna dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya dalam menghadirkan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan bagi sektor publik. Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan evaluasi renja pada tahun berjalan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta target yang ingin dicapai berkenaan dengan perencanaan yang berbasis kinerja sehingga capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menjadi terukur.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025;
26. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam Menyusun perubahan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengetahui capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar capaian kinerja program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima serta target-target perencanaan berbasis kinerja, dibutuhkan adanya penambahan beberapa sub kegiatan. Di sisi lain, sejumlah belanja sub kegiatan tetap perlu dirasionalisasi seiring dengan keterbatasan dan dinamika ketersediaan anggaran.

Sejak dihentikannya dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK-NF Yanminduk) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022, kemampuan pembiayaan dari APBD terhadap belanja urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi semakin terbatas. Hal ini ditambah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pada pengendalian belanja dan efisiensi anggaran nasional, sehingga mengakibatkan penyesuaian dan pengurangan sejumlah belanja pada sektor-sektor tertentu, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih proporsional perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan isu-isu sektoral dan kebutuhan spesifik masing-masing Perangkat Daerah, yang tentunya memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda.

Adapun rincian hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2025 yang dikaitkan terhadap prakiraan tingkat realisasi capaian target Renstra s.d. Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4			5			6			7		8		9		10		11		12
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				118,624,142,651			18,737,761,584			21,558,659,072		21,862,802,604		4,017,378,040		-		21,560,744,505		21,517,577,856	
2.12.01	PROGRA M : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	113,440,855,037	Persentase	100	16,738,825,359	Persentase	100	19,405,778,268	100	19,558,625,604	100	4,017,378,040	100	-	100	19,338,337,505	100	19,309,268,356	
2.12.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Perencanaan dan Penganggaran	Persentase	100	49,940,000	Persentase	100	-	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan		
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan																						
2.12.01.2.01.0002	Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	-	-	49,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.01.2.02	Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Perentase	100	73,358,163,359	Perentase	100	14,330,403,765	Perentase	100	16,016,358,188	16,084,903,660	100	3,700,489,613	100	-	100	16,084,903,660	100	16,076,743,660			
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	76	73,023,223,359	Orang /Bulan	91	14,330,403,765	Orang /Bulan	105	16,016,358,188	16,037,963,660	105	3,687,119,613	-	-	105	16,037,963,660	105	16,037,963,660			
2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	-	-	-	-	-	Dokumen	-	-	3	46,940,000	3	13,370,000	-	-	3	46,940,000	3	38,780,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																					
2.12.01.2.02.0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	334,940,000	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase	100	1,945,336,000	Persentase	100	-	Persentase	100	249,356,000	100	163,600,000	100	-	100	-	100	32,720,000	100	32,720,000		
2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	701,540,000	Paket	-	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	946,024,000	Orang	-	-	Orang	20	249,356,000	20	163,600,000	0	0.00	-	-	4	32,720,000	4	32,720,000	
-	Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	297,772,000	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
2.12.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase	1	19,761,547,712	Perse ntase	100	417,539,640	Perse ntase	100	334,358,000	100	335,864,496	100	19,280,732	100	-	100	250,956,397	100	241,027,248	
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	1	82,432,000	Paket	-	-	Paket	1	14,187,000	1	14,187,000	0	0.00	-	-	1	14,187,000	1	7,093,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
		Kantor yang Disediakan																					
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	17,038,558,175	Paket	4	197,628,400	Paket	4	62,163,000	4	59,434,000	0	0.00	-	-	4	52,577,397	4	53,064,000		
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	188,356,000	Paket	1	4,000,000	Paket	2	11,652,000	2	7,650,000	0	0.00	-	-	2	7,650,000	2	5,355,000		
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	288,586,900	Paket	1	2,716,000	Paket	1	10,658,000	1	9,325,496	0	0.00	-	-	1	5,690,000	1	4,662,748		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	2,163,614,637	Laporan	12	213,195,240	Laporan	12	235,698,000	12	245,268,000	3	19,280,732	-	-	12	170,852,000	12	170,852,000	
2.12.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	6,314,835,000	Persentase	100	826,500,000	Persentase	100	761,705,000	100	812,616,000	100	-	100	-	100	812,616,000	100	812,616,000	
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	32	106,960,000	32	106,960,000	0	0.00	-	-	32	106,960,000	32	106,960,000	
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	155	6,314,835,000	Unit	73	826,500,000	Unit	74	654,745,000	74	705,656,000	0	0.00	-	-	74	705,656,000	74	705,656,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
		yang Disediakan																					
2.12.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	9,355,514,529	Persentase	100	1,008,249,954	Persentase	100	761,176,080	100	898,686,448	100	268,859,495	100	-	100	894,186,448	100	894,186,448		
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	460,658,822	Laporan	1	17,759,788	Laporan	1	60,750,000	1	40,500,000	1	2,272,000	-	-	1	40,500,000	1	40,500,000		
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2,575,504,564	Laporan	4	382,552,618	Laporan	4	474,400,000	4	474,400,000	1	101,811,919	-	-	4	474,400,000	4	474,400,000		
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	13	6,319,351,143	Laporan	13	607,937,548	Laporan	5	226,026,080	5	383,786,448	3	164,775,576	-	-	5	379,286,448	5	379,286,448		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																					
2.12.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	2,655,518,437	Persentase	100	156,132,000	Persentase	100	1,282,825,000	100	1,262,955,000	100	28,748,200	100	-	100	1,262,955,000	100	1,251,975,000		
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	215,753,000	Unit	1	37,647,000	Unit	1	43,540,000	1	40,380,000	1	4,600,000	-	-	1	40,380,000	1	40,380,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	873,546,000	Unit	5	95,841,000	Unit	5	191,419,000	5	179,859,000	5	24,148,200	-	-	5	179,859,000	5	179,859,000	
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	105	503,949,650	Unit	38	21,204,000	Unit	105	71,050,000	105	67,400,000	-	0.00	-	-	105	67,400,000	105	56,420,000	
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1,062,269,787	Unit	1	1,440,000	Unit	1	976,816,000	1	975,316,000	-	0.00	-	-	1	975,316,000	1	975,316,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase	100	2,383,364,984	Persentase	100	1,904,631,300	Persentase	100	1,828,830,000	100	1,889,783,000	100	-	100	-	100	1,871,341,000	100	1,886,598,500	
2.12.02.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusannya dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	2,005,264,854	Persentase	100	1,900,381,300	Persentase	100	1,802,661,000	100	1,866,518,000	100	-	100	-	100	1,848,556,000	100	1,866,518,000	
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Dokumen	12	466,464,000	Dokumen	12	58,085,300	Dokumen	12	79,193,000	12	122,823,000	-	0.00	-	-	12	104,861,000	12	122,823,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
		Kependudukan																					
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	160,000	1,538,800,854	Dokumen	150,592	1,842,296,000	Dokumen	150,000	1,723,468,000	150,000	1,743,695,000	29,452	0.00	-	-	150,000	1,743,695,000	150,000	1,743,695,000		
2.12.02.2.02	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani dokumen kependudukan sesuai ketentuan	Persentase	100	61,479,363	Persentase	100	-	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	-	-	61,479,363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Perse ntase	100	316,620,767	Perse ntase	100	4,250,000	Perse ntase	100	26,169,000	100	23,265,000	100	-	100	-	100	22,785,000	100	20,080,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.02.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	316,620,767	Laporan	1	4,250,000	Laporan	1	26,169,000	1	23,265,000	-	0.00	-	-	1	22,785,000	1	20,080,500	
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Persentase	100	1,794,184,343	Persentase	100	87,757,025	Persentase	100	279,508,000	100	293,916,000	100	-	100	-	100	260,902,000	100	244,667,000	
2.12.03.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusannya dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	1,477,563,577	Persentase	100	60,805,000	Persentase	100	194,558,000	100	208,966,000	100	-	100	-	100	197,072,000	100	181,072,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	42,000	1,477,563,577	Dokumen	31,802	60,805,000	Dokumen	40,000	194,558,000	40,000	208,966,000		0.00	-	-	40,000	197,072,000	40,000	181,072,000	
2.12.03.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase	100	316,620,766	Persentase	100	26,952,025	Persentase	100	84,950,000	100	84,950,000	100	-	100	-	100	63,830,000	100	63,595,000	
2.12.03.2.02.0008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	316,620,766	Laporan	1	26,952,025	Laporan	1	84,950,000	1	84,950,000	-	0.00	-	-	1	63,830,000	1	63,595,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Persentase	100	1,005,738,287	Persentase	100	6,547,900	Persentase	100	44,542,804	100	40,080,000	100	-	100	-	100	37,986,000	100	34,282,200	
2.12.04.2.01	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	Persentase	100	702,925,435	Persentase	100	6,547,900	Persentase	100	25,530,000	100	25,530,000	100	-	100	-	100	23,436,000	100	23,047,200	
2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	11	702,925,435	Dokumen	11	6,547,900	Dokumen	11	25,530,000	11	25,530,000	-	0.00	-	-	11	23,436,000	11	23,047,200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
2.12.04.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase	100	302,812,852	Persentase	100	-	Persentase	100	19,012,804	100	14,550,000	100	-	100	-	100	14,550,000	100	11,235,000	
2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	302,812,852	Laporan	1	-	Laporan	1	19,012,804	1	14,550,000	-	0.00	-	-	1	14,550,000	1	11,235,000	
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	80,398,000		-		-	100	52,178,000		42,761,800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2024			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2025		Keterangan	
			Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
		Perundang-Undangan																					
2.12.05.2.01	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	80,398,000		-		-	100	52,178,000		42,761,800		
2.12.05.2.01.0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	1	80,398,000	-	0.00	-	-	1	52,178,000	1	42,761,800		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam hingga Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan masih adanya sejumlah kendala serius yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan kenyamanan pelayanan publik. Gedung pelayanan utama yang telah berusia lebih dari 15 tahun dinilai tidak lagi layak dan tidak mampu menampung jumlah pemohon yang terus meningkat, dengan rata-rata 300 kunjungan per hari. Keterbatasan ruang tunggu, antrean panjang, minimnya lahan parkir, dan tidak tersedianya fasilitas khusus seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, loket prioritas, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas menyebabkan kondisi yang tidak nyaman, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini tidak hanya menurunkan kepuasan publik tetapi juga bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 dan PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014, yang mengamanatkan penyediaan sarana pelayanan yang layak, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi operasional, kualitas pelayanan juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Sebagian besar pegawai yang menangani sistem informasi administrasi kependudukan (SIAD) belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai, sehingga pemrosesan dokumen berjalan lambat dan berisiko menimbulkan kesalahan input data. Selain itu, perangkat komputer yang digunakan di beberapa loket pelayanan sudah tidak mendukung sistem terbaru, dan koneksi internet yang tidak stabil kerap mengganggu proses sinkronisasi data dengan sistem pusat. Arsip-arsip kependudukan masih disimpan secara manual dengan keterbatasan ruang penyimpanan, meningkatkan risiko kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan pencarian data. Permasalahan klasik seperti fluktuasi ketersediaan blangko KTP—yang bergantung penuh pada distribusi pusat—semakin memperburuk kualitas layanan, terlebih di tengah pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai lebih dari 3,5% per tahun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut dan meningkatkan kinerja pelayanan ke arah yang lebih profesional dan inklusif, diperlukan langkah strategis yang komprehensif dan terencana. Relokasi atau pembangunan gedung pelayanan baru yang lebih representatif dan modern menjadi kebutuhan mendesak, diikuti dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di kecamatan-kecamatan strategis untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Perluasan kapasitas SDM disertai pelatihan teknis rutin harus dilakukan guna mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data. Digitalisasi layanan berbasis daring, sistem antrean elektronik, serta

integrasi sistem pengarsipan menjadi solusi untuk mendorong efisiensi pelayanan serta menghindari praktik maladministrasi seperti percaloan, sebagaimana yang pernah menjadi sorotan KPK. Dengan sinergi antara peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas internal, dan pemanfaatan teknologi, Disdukcapil Kota Batam diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kependudukan yang berkualitas, cepat, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Pelaksanaan dan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut Isu-isu penting yang dihadapi meliputi :

1. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan**
Gedung pelayanan utama yang sudah tua dan tidak memadai menyebabkan layanan menjadi tidak nyaman dan tidak efisien. Overcrowding, antrean panjang, serta minimnya fasilitas pendukung (seperti ruang tunggu, lahan parkir, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, dll) berdampak pada penurunan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.
2. **Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi Tidak Diimbangi Kapasitas Layanan**
Laju pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai lebih dari 3,5% per tahun menyebabkan lonjakan permintaan pelayanan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta, dll). Namun, kapasitas pelayanan, baik dari segi infrastruktur maupun SDM, belum mampu mengimbangi lonjakan tersebut.
3. **Minimnya Unit Layanan yang Terdesentralisasi**
Konsentrasi pelayanan di kantor pusat Disdukcapil menyebabkan penumpukan pemohon dan antrean panjang. Ketidadaan atau keterbatasan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di kecamatan menyebabkan masyarakat harus datang jauh ke sudut kota, yang memicu ketidaknyamanan dan biaya sosial.
4. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Terlatih**
Belum semua pegawai menguasai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pelayanan digital secara optimal. Hal ini berpengaruh pada lambatnya pemrosesan, tingginya risiko kesalahan data, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

5. **Belum Optimalnya Digitalisasi dan Integrasi Sistem**
Pelayanan administrasi kependudukan secara daring masih terbatas. Perangkat keras yang usang, jaringan internet yang tidak stabil, dan sistem pengarsipan yang belum sepenuhnya digital menghambat kecepatan dan akurasi pelayanan.
6. **Fluktuasi Ketersediaan Blangko KTP dan Ketergantungan pada Pusat**
Pasokan blangko KTP masih bergantung pada Ditjen Dukcapil Pusat. Ketika distribusi tersendat atau jumlahnya terbatas, pelayanan terganggu dan menimbulkan antrean serta keluhan masyarakat.
7. **Potensi Maladministrasi dan Percaloan dalam Pelayanan**
Kurangnya sistem antrean yang transparan, waktu tunggu yang lama, dan ruang layanan yang tidak representatif membuka celah terjadinya praktik tidak resmi seperti percaloan. Hal ini telah menjadi perhatian serius dari KPK dan Ombudsman.
8. **Pengelolaan Arsip Fisik yang Belum Efisien**
Sistem pengarsipan dokumen kependudukan masih banyak yang dilakukan secara manual, dengan ruang penyimpanan yang terbatas. Hal ini menimbulkan risiko kehilangan arsip, kerusakan data, dan kesulitan dalam pencarian dokumen.
9. **Kurangnya Aksesibilitas Bagi Kelompok Rentan**
Belum tersedia layanan yang ramah bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan layanan publik sesuai standar pelayanan minimal.
10. **Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Publik tentang Pelayanan Dukcapil**
Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur layanan daring, hak dan kewajiban kependudukan, serta pentingnya dokumen seperti IKD (Identitas Kependudukan Digital). Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan tingginya potensi kesalahan saat mengakses layanan.

Mempertimbangkan urgensi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan publik, kiranya Bapak Wali Kota Batam dapat mempertimbangkan usulan percepatan perbaikan layanan melalui pendekatan mekanisme kumulatif terbuka yang terfokus pada sejumlah isu strategis. *Pertama*, diperlukan relokasi atau renovasi gedung pelayanan Disdukcapil dengan membangun fasilitas baru yang lebih representatif, modern, dan ramah pengguna guna mengakomodasi lonjakan pemohon.

Kedua, penambahan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di tingkat kecamatan penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan di kantor pusat. *Ketiga*, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan mencakup perluasan ruang tunggu, penyediaan lahan parkir, ruang laktasi, ruang bermain anak, serta fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. *Keempat*, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan tenaga teknis dan pelatihan intensif sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kompleksitas pelayanan berbasis sistem informasi. *Kelima*, guna menjamin ketersediaan dokumen kependudukan, perlu dilakukan pengajuan alokasi anggaran daerah untuk mendukung distribusi blangko KTP melalui mekanisme hibah ke Ditjen Dukcapil serta mempercepat proses distribusinya dari pemerintah pusat. *Terakhir*, modernisasi teknologi dan sistem pengarsipan perlu segera diwujudkan melalui pembaruan perangkat IT, peningkatan stabilitas jaringan internet, dan digitalisasi arsip secara terintegrasi guna mempercepat, mempermudah, dan mengamankan pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 86 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Masyarakat;
3. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder.

Adapun target serta indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	88,31	89	90	91	92
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	89%	93%	97%	99%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	21%	34%	48%	100%	100%	100%

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan pedoman utama yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Selain melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021–2026, pada dokumen Perubahan Renja Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam juga merencanakan penambahan rincian pada beberapa Sub Kegiatan. Penambahan ini mencakup antara lain: pemenuhan kebutuhan alat cetak KTP untuk 12 kecamatan dan 1 unit tambahan di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP); penyesuaian distribusi blangko KTP melalui usulan alokasi anggaran daerah sebagai mekanisme hibah kepada Ditjen Dukcapil; serta penyesuaian kebutuhan belanja ribbon sebagai bahan pendukung pencetakan KTP, yang belum tercakup secara memadai dalam Renja Murni Tahun 2025.

Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan prioritas dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, khususnya mengingat keterbatasan infrastruktur dan sarana pelayanan yang saat ini dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami rasionalisasi belanja, menyesuaikan dinamika ketersediaan anggaran pada APBD Kota Batam Tahun 2025.

Dengan demikian, dilakukan penyesuaian terhadap rincian belanja dalam dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, guna menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Rincian lengkap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah diusulkan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						21.558.659.072	25.537.827.351	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	19.405.778.268	20.966.191.407	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	16.016.358.188	17.037.440.659	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	16.016.358.188	16.994.580.659	Penyesuaian Gaji PPPK yang lulus sebanyak 13 Orang
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	13 Dokumen	-	42.860.000	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	-	-	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	249.356.000	32.720.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	-	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4 Orang	249.356.000	32.720.000	
		Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0 0	0	-	-	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	334.358.000	256.148.248	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.187.000	12.590.500	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	62.163.000	62.688.000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.652.000	5.355.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.658.000	4.662.748	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	235.698.000	170.852.000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	761.705.000	1.584.444.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	32 Unit	32 Unit	106.960.000	106.960.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	83 Unit	654.745.000	1.477.484.000	Pembelian Printer Fargo untuk Distribusi Alat Cetak KTP Tingkat Kecamatan dan MPP

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	761.176.080	783.303.500	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	60.750.000	58.522.140	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	474.400.000	474.400.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	6 Laporan	226.026.080	250.381.360	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.282.825.000	1.272.135.000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000	40.380.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	191.419.000	200.019.000	Kebutuhan BBM untuk Mobil Pelayanan Keliling/Jemput Bola
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	83 Unit	71.050.000	56.420.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	976.816.000	975.316.000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 Persen	100 Persen	1.828.830.000	4.202.353.500	
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 Persen	100 Persen	1.802.661.000	4.182.273.000	
		Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	79.193.000	130.423.000	Kebutuhan ATK khususnya Kertas HVS
		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150000 Dokumen	150000 Dokumen	1.723.468.000	4.051.850.000	Kebutuhan Pendukung Alat Cetak KTP Seperti Ribbon, serta Hibah Blangko KTP
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan	100 Persen	100 Persen	26.169.000	20.080.500	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
				Pendaftaran Penduduk					
		Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	26.169.000	20.080.500	
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	100 Persen	100 Persen	279.508.000	292.238.444	
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 Persen	100 Persen	194.558.000	228.643.444	
		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	40000 Dokumen	40000 Dokumen	194.558.000	228.643.444	Kebutuhan ATK khususnya Kertas HVS
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Persen	100 Persen	84.950.000	63.595.000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
		Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	84.950.000	63.595.000	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	44.542.804	34.282.200	
		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100 Persen	100 Persen	25.530.000	23.047.200	
		Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	11 Dokumen	25.530.000	23.047.200	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	100 Persen	19.012.804	11.235.000	
		Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	19.012.804	11.235.000	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0 -	100 Persen	-	42.761.800	
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data Kependudukan	0 -	100 Persen	-	42.761.800	
		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0 Dokumen	1 Dokumen	-	42.761.800	

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Pada sub bab ini diuraikan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disertai pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada anggaran perubahan tahun 2025. Terdapat berbagai macam sumber pendanaan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Beberapa Sumber pendanaan daerah di antaranya adalah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan patokan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas pada setiap tahunnya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja disusun untuk mengatasi permasalahan dan mengakomodir kebutuhan yang timbul, menangani isu- isu strategis yang sedang terjadi dan tentunya dalam kerangka visi-misi yang serta sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan target indikator kinerja serta pendanaan indikatif perubahan tahun anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting	
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											21.558.659.072,00	25.537.827.351,00			
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah			100	Tetap						19.405.778.268,00	20.966.191.407,00			
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi										16.016.358.188,00	17.037.440.659,00		
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			105 Orang/B ulan	105 Orang/B ulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tetap	16.016.358.188,00	16.994.580.659,00	DAU, PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Hasil Rekon Gaji dan Tunjanga n	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.01.2.02. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			0 Dokumen	13 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tetap	-	42.860.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana										249.356.000,00	32.720.000,00		
2.12.01.2.05. 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			20 Orang	4 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tetap	249.356.000,00	32.720.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah										334.358.000,00	256.148.248,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurahan Sei Harapan			1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tetap	14.187.000,00	12.590.500,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurahan Sei Harapan			4 Paket	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tetap	62.163.000,00	62.688.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Dukunga n Pelayana n
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurahan Sei Harapan			2 Paket	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tetap	11.652.000,00	5.355.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tetap	10.658.000,00	4.662.748,00	PENDA PA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tetap	235.698.000,00	170.852.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi										761.705.000,00	1.584.444.000,00		
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			32 Unit	32 Unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tetap	106.960.000,00	106.960.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			74 Unit	83 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tetap	654.745.000,00	1.477.484.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Penamba han Alat Rekam dan Alat Cetak KTP untuk 12 Kecamatan dan MPP
2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah										761.176.080,00	783.303.500,00		
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tetap	60.750.000,00	58.522.140,00	PENDA PA TAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurahan Sei Harapan			4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tetap	474.400.000,00	474.400.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Kecamatan Sekupa ng, Kelurahan Sei Harapan			13 Laporan	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tetap	226.026.080,00	250.381.360,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Penyesuaian Gaji THL lolos PPPK
2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.282.825.000,00	1.272.135.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			1 Unit	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tetap	43.540.000,00	40.380.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			5 Unit	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		191.419.000,00	200.019.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Penamba han BBM untuk Mobil Layanan Jemput Bola

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting	
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah			
2.12.01.2.09. 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			105 Unit	83 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tetap	71.050.000,00	56.420.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)		
2.12.01.2.09. 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Batam, Kecamat an Sekupa ng, Kelurah an Sei Harapan			1 Unit	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tetap	976.816.000,00	975.316.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan			100	Tetap						1.828.830.000,00	4.202.353.500,00			
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan											1.802.661.000,00	4.182.273.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukana	Tetap	79.193.000,00	130.423.000,00	PENDATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan Alat Tulis Kantor Khususnya Kertas
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150000 Dokumen	150000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tetap	1.723.468.000,00	4.051.850.000,00	PENDATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan Bahan Pendukung Alat Cetak KTP, dan Hibah Blangko KTP-El
2.12.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										26.169.000,00	20.080.500,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.02.2.03. 0005	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an			1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tetap	26.169.000,00	20.080.500,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil			100	Tetap						279.508.000,00	292.238.444,00		
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan										194.558.000,00	228.643.444,00		
2.12.03.2.01. 0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an			40000 Dokumen	40000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tetap	194.558.000,00	228.643.444,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Penamba han Alat Tulis Kantor Khususn ya Kertas
2.12.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										84.950.000,00	63.595.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.03.2.02. 0008	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an			1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Tetap	84.950.000,00	63.595.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil				100	Tetap					44.542.804,00	34.282.200,00		
2.12.04.2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama										25.530.000,00	23.047.200,00		
2.12.04.2.01. 0002	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka n	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an			11 Dokumen	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka n	Tetap	25.530.000,00	23.047.200,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										19.012.804,00	11.235.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
	Administrasi Kependudukan														
2.12.04.2.03. 0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an			1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Tetap	19.012.804,00	11.235.000,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependuduka n	Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan					100					-	42.761.800,00		
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data Kependudukan										-	42.761.800,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Catatan Penting
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesud ah	Sebelum	Sesudah		
2.12.05.2.01. 0002	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang Lain	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an			0 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang Lain	Tetap	-	42.761.800,00	PENDA PA TAN ASLI DAERA H (PAD)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2025 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka :

1. Perubahan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan/ *stakeholders* yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. Perubahan Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025;

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, segala kebutuhan anggaran akan disusun dalam skala prioritas penganggaran sehingga proses perencanaannya dapat berjalan secara proporsional dengan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam rancangan akhir RPJMD Kota Batam 2025-2029. Pada akhir tahun

anggaran 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD